



Judul : SPR Solusi Bantu Peternak Rakyat
Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

SPR Solusi Bantu Peternak Rakyat

SENAYAN soroti belum adanya kebijakan signifikan yang mampu mengangkat taraf hidup peternak rakyat. Kehidupan para peternak sapi terus terhimpit karena komoditi yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan daging sapi impor.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mendorong agar konsep Peternakan Sapi Rakyat ini kembali diimplementasikan.

“Dulu itu ada konsep Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Kita ini tidak seperti Australia dan New Zealand yang punya peternakan banyak, karena kita ini (sapinya) di kandang-kandang rakyat,” kata Akmal di Jakarta, kemarin.

SPR ini merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Didalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa. Konsep ini dirintis pertama kali oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Akmal menuturkan, problem terbesar yang dihadapi para peternak saat ini, saat hendak menjual ternak miliknya, tidak ada pihak atau perusahaan yang tertarik untuk membeli.

Dengan SPR, ada upaya untuk mengkorporasikan para peternak dalam suatu kawasan lengkap dengan *offtaker*-nya (penjamin komoditas sapi rakyat). “Jadi kata kuncinya *offtaker*,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKS ini

mengusulkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia-kini ID Food, atau Bulog menjadi *offtaker* bagi peternak rakyat. BUMN ini kudu dibekali dengan anggaran yang memadai. Dengan demikian, ada kepastian pasar bagi peternak, impor daging sapi pun bisa berkurang signifikan.

Senada, anggota Komisi IV DPR Slamet juga menyoroti nasib peternak unggas yang tidak berdaya menghadapi persaingan perusahaan unggas besar. Saat produksi unggas melimpah, harga di tingkat peternak anjlok.

Ironisnya, kebijakan yang diambil justru menyepelekan nasib peternak. Oleh Pemerintah selalu ditempuh dengan cara mengurangi stok melalui *cutting DOC* atau afkir dini.

“Padahal ujung dari semua ini pasti berawal dari impor GPS-nya (*Grand Parent Stock*/indukan ayam),” katanya.

Slamet menuturkan, *over stok* unggas saat ini justru terjadi akibat kelebihan impor untuk GPS. Makanya dia mendorong agar ada data yang valid terkait kebutuhan impor GPS. Ini untuk memastikan kebutuhan impor unggas untuk perusahaan.

Dia curiga impor yang dilakukan selama ini hanya menuhi kepentingan perusahaan. “Karena itu harus ada data riil kebutuhan nasional dan realisasi impor GPS,” jelasnya. ■ KAL